

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DIKOTA MANADO

Tessa Lonica Karouw, Daisy S. M. Engka, Krest D. Tolosang

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Raturangi, Manado 95115, Indonesia

Email : tessakarouw2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam suatu banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasal sentralisasi menjadi desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini digunakan penelitian Analisis Regresi Berganda, jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sampel yang diambil dari 12 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 variabel yaitu, pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah. Dalam penelitian ini variabel tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah di Kota Manado.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the level of regional financial independence. In a large number of regions in Indonesia, it is difficult for the central government to coordinate of existing government in the regions so that to facilitate services and governance arrangements, the central government changes the policies that previously came from centralization to decentralization. The manifestation of the decentralization policy is the birth of regional autonomy. Regional original income, which includes regional taxes and regional levies, is expected to be one of the sources of local government revenue in increasing regional financial independence. This study used multiple regression analysis research, this type of research is descriptive qualitative, sample taken from 12 respondents. The results of this study indicate that there are 3 variables, namely, economic growth, local tax revenues, and regional levies. In this study, the variable level of regional financial independence has a positive but not significant effect on economic growth. Local taxes, regional levies in Manado City.

Keywords: Economic Growth, Regional Tax Revenue, Regional Retribution Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak tahun 1999 sistem pemerintahan di Indonesia adalah sentralistik yang menimbulkan ketidakmerataan keadilan bagi daerah, namun sebelumnya sistem pemerintahan diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal dengan era otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengganti Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasal sentralisasi menjadi desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Feni Febriyanti, Muhammad Faris (2019).

Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja masih di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Di era otonomi diharapkan daerah menjadi lebih mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan meningkatnya PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah. H.Mukarramah (2016).

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Sulawesi Utara berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber PAD nya yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Sulawesi Utara memiliki empat daerah tingkat dua yang berstatus sebagai kota. Keempat kota tersebut adalah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu. Perkembangan roda pembangunan pada keempat kota tersebut menjadi pemicu yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Semangat otonomi daerah memacu pemerintah di keempat kota tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada keempat kota tersebut.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah Rata-Rata Per Tahun (2007-2016)

Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kemandirian Keuangan Daerah (%)
Manado	6,99	164.597.891.992	15,56
Bitung	6,25	12.330.961.415	2,54
Tomohon	5,55	46.749.792.990	7,28
Kotamobagu	6,46	14.782.543.434	3,16

Sumber : BPS Sulut-Data diolah, 2018

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 1.2 maka dapat dilihat bahwa Kota Manado memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan tiga kota yang lain, baik untuk Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi. maupun kemandirian keuangan daerah. Sedangkan tiga kota yang lain memiliki nilai indikator yang bervariasi. Pemerintah Sulawesi Utara diharapkan mampu memacu perkembangan daerahnya untuk meningkatkan kemampuan yang optimal dalam mengurus rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber daya yang potensial yang ada didaerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena pertumbuhan mengindikasikan bahwa suatu daerah tersebut dapat dikatakan maju dan berkembang (Kawa : 2011).

Rumusan masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kota manado ?
2. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kota manado
3. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kota manado ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pendapatan asli daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya”. Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

(Mardiasmo (2002 :146)

2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Penerangan Arah Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- g. Pajak Parkir

2.3 Pengertian Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha

2.4 Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Selanjutnya pada sumber PAD ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

2.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Keempatnya akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

2.6 Jumlah Penduduk

Para perencana pembangunan memandang jumlah penduduk yang besar di Indonesia sebagai aset modal dasar sekaligus sebagai beban pembangunan. Dalam hal aset, jika jumlah penduduk yang besar mampu meningkatkan kualitas, keahlian dan keterampilannya, hal tersebut akan meningkatkan kualitas produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya yang menuntut pelayanan sosial serta tingkat produksi yang rendah hanya akan menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif dan produktif.

2.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 2004). Menurut Boediono (1992), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek : 1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses ekonomis, suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu output total dan jumlah penduduk. 3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan prespektif waktu, suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita.

2.8 Faktor-faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

2.9 Definisi Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah "Iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk". Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Marihot P.Siahaan (2005:7) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut: Pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

2.10 Perhitungan Pajak Daerah

Untuk mempermudah menyusun laporan pajak maka ada cara-cara perhitungan yang harus diikuti. Perhitungan pajak dapat dilakukan berdasarkan dari jenis-jenis pajak, karena tarif yang dikenakan untuk masing-masing pajak ditetapkan berdasarkan jenis-jenisnya. Besarnya pajak daerah yang terhutang untuk masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

2.11 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku, Halim (2004). Dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

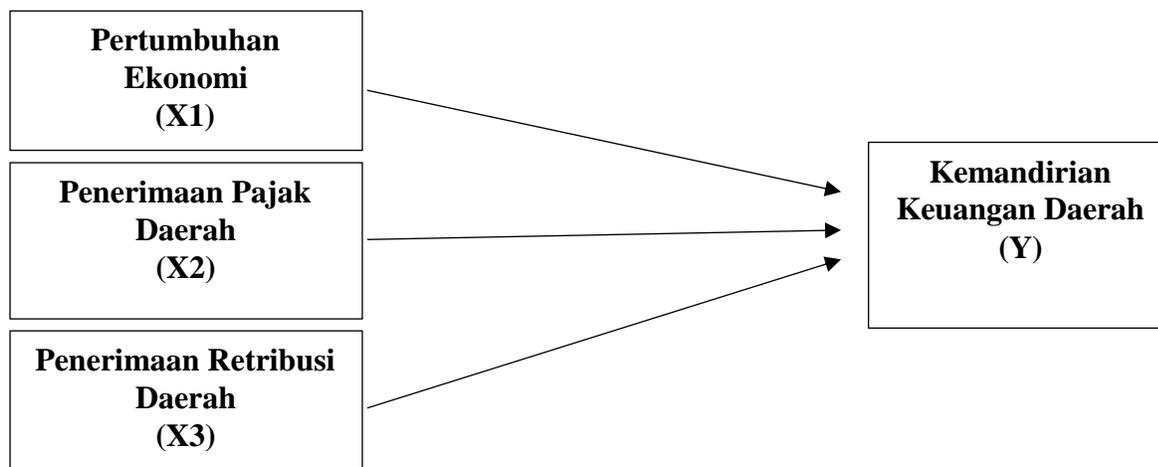
- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.12 Kemandirian Keuangan Daerah

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah mengenai pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar balanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran

statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan dan kemandirian daerah (Yuliati, 2001).

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian melalui beberapa buku bacaan, literatur atau keterangan-keterangan ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi dalam menganalisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. *Internet Research*

Penelitian melalui website untuk memperoleh teori dan data dalam penelitian ini.

Jenis Data

Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai subjek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data, yaitu data kuantitatif yang berarti data yang berupa bilangan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah analisis yang di lakukan untuk menilai apakah didalam sebuah model regresi Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang di lakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. A Hidayat(2012).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas di gunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi di ulang kembali. Anggraeni (dalam Singgih Santoso, 2010:234).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Ghozali (2012:110).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya Rindawati (2014).

Uji t

Pengujian secara individual (uji-t) yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik yang akan di uji. Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh nyata atau tidak, digunakan uji t Ghifari (2016). Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa koefisien determinasi majemuk dalam populasi, R^2 , sama dengan nol. Uji signifikansi meliputi pengujian signifikansi persamaan regresi secara keseluruhan serta koefisien regresi parsial spesifik. Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan menggunakan statistic F (Sutrisni, 2010).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti variasi variabel dependen yang sangat terbatas, dan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen sudah dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (Crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (Time series) biasanya mempunyai data koefisien determinasi yang lebih tinggi. Kelemahan dasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan variabel independen, maka nilai R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ataupun tidak Ghozali (2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardize Coefficients B	Std. Error	Standard dized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.354	.445		5.285	.001		
	Pertumbuhan Ekonomi	-.004	.010	-.162	-.364	.725	.550	1.820
	PenerimaanP ajakDaerah	-.044	.109	-.167	-.402	.698	.637	1.569
	PenerimaanR etribusiDaera h	-.040	.057	-.326	-.710	.498	.517	1.935

Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Uji t-Statistik

Persamaan Regresi $Y=2.354-0,004X_1 + 0,044X_2 + 0,040X_3$ menggambarkan bahwa variable bebas (independent) Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pajak Daerah (X2), Retribusi Daerah (X3) mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah (Y), berikut ini adalah interpretasinya :

- Nilai konstanta sebesar 2,354 mengandung arti bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, masih dalam posisi nol maka besarnya pendapatan adalah sebesar 2,354 persen.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.004 mengandung makna bahwa jika modal usaha meningkat sebesar 1 persen maka pendapatan pedagang juga akan meningkat sebesar 0.004
- Nilai Koefisien regresi untuk variabel pajak daerah sebesar 0.044 mengandung makna bahwa jika lama usaha meningkat sebesar 1 satuan (tahun) maka pendapatan pedagang juga akan meningkat sebesar 0,044
- Nilai Koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah sebesar 0.040 mengandung makna bahwa jika pendidikan meningkat sebesar 1 persen maka pendapatan pedagang juga akan meningkat 0.040

Pengaruh Variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri dapat dilihat dalam nilai uji t_{hitung} kemudian nilai uji t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

- Nilai t_{hitung} Pertumbuhan Ekonomi -364 , nilai t_{hitung} Pajak Daerah $-,402$, Nilai t_{hitung} Retribusi Daerah $-,710$.
- Nilai t_{tabel} 1,833 yang diperoleh dari alpha 0.05 dan df sebesar (12-3). dari sisi signifikannya Pertumbuhan Ekonomi 0,725, Pajak Daerah 0,698, Retribusi Daerah 0,498 menunjukkan

bahwa positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Manado maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji F

Berdasarkan data output diatas bahwa nilai F hitung pada model penelitian ini adalah sebesar 393. Dengan taraf signifikansi sebesar 0.000, nilai F tabel adalah 3.49 yang diperoleh dari alpha 0.05 dan df (12= jumlah responden 3= variabel bebas). Nilai F hitung 393 lebih besar dari nilai F tabel 3.49. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian pengaruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R^2 adalah 0,128. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, menerangkan variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 12,8 % sedangkan sisanya sebesar 87,2 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh bahwa hanya variabel seperti Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pengaruh dari variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Sumatera utara Dan dari hasil penelitian saya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado. Dengan hasil pertumbuhan ekonomi 0.725 dari alpha 0.05
- Hasil Barlina (2018) menemukan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Dan dari hasil penelitian saya bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado. Dengan hasil pajak daerah 0.698 dari alpha 0.05.
- Hasil penelitian oleh Habibatul Mukarromah (2017) menemukan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Dan dari hasil penelitian saya bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado. Dengan hasil retribusi daerah 0.498 dari alpha 0.05.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut;

- a. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado
- b. Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado.

- c. Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut : Menambah variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, seperti ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, belanja daerah dan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan juga karena variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sudah termasuk ke dalam rumus penghitungan tingkat kemandirian keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2011). Analisis Investasi. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat*
- Boediono, (1992), Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.*
- Feni Febriyanti, Muhammad Faris (2019), Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.*
- Ghozali, Imam. (2012), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.*
- Ghozali, Imam. (2012), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.*
- Habibatul, Mukarramah. (2017), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2008 - 2014, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.*
- Kawa. (2011), Ethics and International Affairs 27(2): 207–221 Hassan, .*
- Mardiasmo, (2002), Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta,*
- Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.*
- Prakosa, (2003), Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press. Yogyakarta*
- Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rinneka Cipta.*
- Sukirno, Sadono. (2004), Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta : Jakarta Press.*
- Santoso, Singgih, (2010), Statistik Multivariat, Jakarta:PT Elex Media Komputindo.*

Sutrisni. (2010), *Analisis Pengaruh Loyaliats Produk, Kualitas Pelayanan, Desain Produk, Harga dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan Indosat IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*. Tesis (tidak dipublikasikan). Semarang: BPFE Undip.

Yuliati. (2001), *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.